

# Implementasi Sistem Teseng sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi dan Penguatan Manajemen Usaha Ternak Sapi Potong di Desa Bune

ST. Rohani<sup>1\*</sup>, Ahmad Ramadhan Siregar<sup>1</sup>, Tanri Giling Rasyid<sup>1</sup>, Muhammad Darwis<sup>2</sup>, Putra Astaman<sup>3</sup>, Muhammad Ridwan<sup>1</sup>, Muhammad Erik Kurniawan<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Universitas Hasanuddin, Indonesia

<sup>2</sup>Lembaga Penelitian, Pengembangan, Pemberdayaan Potensi Indonesia, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

<sup>4</sup>Universitas Muhammadiyah Sinjai, Indonesia

\*Email: strohani@unhas.ac.id

## INFORMASI ARTIKEL

**Kata Kunci:**  
sapi potong;  
sistem teseng;  
bagi hasil;  
kepercayaan;  
peternak

**DOI:**

<https://doi.org/10.3305/agrisevika.v2i1.18>

**Naskah Diajukan:**

29 Agustus 2025

**Naskah Diterima:**

03 September 2025

**Naskah Diterbitkan:**

09 September 2025



This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License.

## **ABSTRAK**

Sistem teseng menjadi solusi keterbatasan modal peternak sapi potong di Kabupaten Bone, namun memiliki kelemahan yaitu ketiadaan kontrak tertulis sehingga dapat berpotensi menimbulkan konflik. Penelitian ini menganalisis bentuk sistem teseng, faktor pengambilan keputusan peternak, dan efektivitas pengelolaannya menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara 25 peternak, observasi, dan FGD. Hasil menunjukkan tiga pola: (1) anak pertama ke pemilik modal (53%), (2) anak pertama ke peternak (32%), dan (3) bagi rata dua induk (15%). Faktor dominan adalah tekanan ekonomi (78%) dan kepercayaan keluarga (89%), namun 92% peternak menghadapi risiko akibat tidak ada perjanjian tertulis. Sistem ini meningkatkan pendapatan 35-40%, tetapi terhambat manajemen tradisional (70% gembala-kandang). Simpulan: sistem teseng efektif secara ekonomi tetapi memerlukan penguatan aspek legal dan manajemen modern.

## **ABSTRACT**

*The teseng system addresses capital limitations for small-scale beef cattle farmers in Bone District but it has a weakness, namely the absence of a written contract, which could potentially give rise to conflict. This study analyzes the system's variants, farmers' decision-making factors, and management effectiveness using descriptive qualitative methods (interviews with 25 farmers, observation, and FGD). Results reveal three models: (1) first offspring to the owner (53%), (2) first offspring to the farmer (32%), and (3) equal sharing of two cows (15%). Key drivers are economic pressure (78%) and familial trust (89%), yet 92% of farmers face risks from oral agreements. The system increases income by 35-40%, but traditional management (70% pasture-and-stall) limits productivity. The study concludes that teseng is economically viable but requires legal formalization and modern management for sustainability.*

## **Cara Kutip:**

Rohani, S., Siregar, A. R., Rasyid, T. G., Darwis, M., Astaman, P., Ridwan, M., & Kurniawan, M. E. (2025). Implementasi Sistem Teseng sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi dan Penguatan Manajemen Usaha Ternak Sapi Potong di Desa Bune. Jurnal Aplikasi Sains Dan Teknologi : Agrisevika, 2(1), 41-49. <https://doi.org/10.33005/agrisevika.v2i1.18>.

## PENDAHULUAN

Sistem teseng atau bagi hasil dalam peternakan sapi potong merupakan model kerjasama tradisional yang telah lama diterapkan di Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan, seperti Kabupaten Bone. Sistem ini melibatkan pemilik modal (investor) dan peternak (pa'teseng) dalam pengelolaan ternak dengan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan (Sirajuddin et al., 2014). Praktik ini tidak hanya berperan dalam meningkatkan populasi sapi potong tetapi juga menjadi solusi bagi peternak yang memiliki keterbatasan modal (Sirajuddin, 2013). Namun, meskipun telah berjalan secara turun-temurun, sistem teseng masih menghadapi tantangan, seperti ketiadaan perjanjian tertulis yang berpotensi menimbulkan konflik (Ardiansyah, 2013).

Permintaan daging sapi nasional terus meningkat seiring pertumbuhan populasi dan kesadaran akan gizi protein hewani (Departemen Pertanian, 2012). Namun, produksi dalam negeri belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan tersebut akibat rendahnya produktivitas peternakan rakyat (Guntoro & Riyadi, 2012). Sistem teseng diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mendorong skalausaha peternakan skala kecil melalui kemitraan yang saling menguntungkan (Sumanto, 2013). Studi di Kabupaten Kupang menunjukkan bahwa sistem bagi hasil dapat meningkatkan pendapatan peternak hingga 30–40% (Jeremias et al., 2017), sementara di Kabupaten Bone, sistem ini berkontribusi pada peningkatan status sosial peternak (Rohani et al., 2019).

Keunikan sistem teseng terletak pada fleksibilitas mekanisme bagi hasil dan ketergantungan pada nilai kepercayaan (*trust*) antar pihak (Sirajuddin et al., 2011). Sanjaya & Sudarwati (2015) menyatakan bahwa modal sosial menjadi kunci keberlanjutan sistem ini, di mana ikatan kekeluargaan dan norma adat menggantikan kontrak formal. Namun, penelitian Ardiansyah (2013) mengungkap kelemahan sistem ini, yaitu risiko kerugian akibat tidak adanya pengaturan jelas terkait penyakit ternak atau gagal reproduksi. Selain itu, peternak seringkali terjebak dalam ketergantungan modal tanpa peningkatan kapasitas usaha (Kusnadi, 2008).

Pemerintah telah memperkenalkan program alternatif seperti Pinjaman Modal Usaha (PMU) atau Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER), namun dianggap kurang efektif karena persyaratan administrasi yang rumit (Rohani et al., 2018). Hal ini memperkuat preferensi peternak terhadap sistem teseng yang lebih sederhana dan adaptif (Zainabriani et al., 2015). Studi Setiawan et al. (2019) juga menekankan perlunya integrasi sistem teseng dengan manajemen pemeliharaan modern untuk meningkatkan efisiensi.

Berdasarkan penelitian di atas, studi ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis bentuk-bentuk sistem teseng yang diterapkan di Kabupaten Bone. (2) Mengidentifikasi faktor pengambilan keputusan peternak dalam mengadopsi sistem teseng. (3) Mengevaluasi efektivitas pengelolaan usaha sapi potong berbasis teseng.

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ekonomi peternakan dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk penguatan sistem bagi hasil berkelanjutan, khususnya dalam konteks pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) poin ke-1 (tanpa kemiskinan) dan ke-2 (tanpa kelaparan).

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk sistem teseng, faktor pengambilan keputusan peternak, dan penerapan pengelolaan usaha sapi potong. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terfokus (FGD). Kegiatan pengabdian dilakukan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

Pengumpulan Data Primer diperoleh dari wawancara dengan peternak dan pemilik modal yang terlibat dalam sistem teseng, FGD dengan kelompok peternak dan pemangku kepentingan, dan observasi langsung terhadap praktik pemeliharaan sapi. Sedangkan Data Sekunder bersumber dari Dokumen perjanjian lisan/tertulis, Laporan statistik peternakan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone (2018), serta Literatur terkait sistem bagi hasil dari jurnal dan buku.

Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Variabel Utama dalam penelitian ini meliputi: bentuk sistem teseng (I, II, III), faktor pengambilan keputusan (modal, ekonomi, waktu luang, status sosial), penerapan pengelolaan usaha (perjanjian, pemeliharaan, bagi hasil). Sedangkan variabel pendukung, meliputi: karakteristik peternak (lama usaha, jumlah ternak) dan peran kepercayaan (*trust*) dan norma adat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Bentuk-Bentuk Sistem Teseng yang Ada di Kabupaten Bone

#### *Bentuk Sistem Teseng I*

Bentuk sistem teseng pertama yaitu dimana sapi yang di berikan oleh pemilik ke peternak untuk dipelihara adalah sapi betina dewasa atau sapi betina yang telah beranak (sapi betina induk), sistem pembagiannya adalah pada tahun pertama, jika anak sapi lahir diberikan kepada pemilik, dan jika anak ke dua lahir pada tahun ke dua di berikan kepada peternak dan begitu seterusnya. Menurut peternak jika sapi betina dewasa (sapi betina induk) di ternakkan tidak membutuhkan waktu lama untuk dapat di kembangbiakkan.

Hasil pengabdian yang ditemukan bahwa pemilik modal sebelum menerapkan sistem teseng biasanya menpercayakan kepada peternak yang ingin memelihara sapi atau kepada peternak yang menawarkan diri untuk melaksanakan sistem teseng sapi potong. Pemilik modal hanya memberikan modal berupa uang kepada peternak dan mempercayakan agar uang yang diberikan kepada peternak tersebut nantinya akan dipakai untuk membeli sapi sesuai dengan jenis sapi yang di inginkan pemilik modal seperti membeli induk sapi ketika dipelihara lebih cepat untuk mendapatkan keturunan dan tentunya akan memberi ke untungan bagi peternak.

#### *Bentuk Sistem Teseng II*

Berbeda dengan bentuk sistem teseng pertama, bentuk sistem teseng kedua ini adalah jenis sapi potong yang di ternakkan adalah sapi betina darah atau sapi betina (sapi dara) yang berumur sekitar 1,5 tahun, sistem pembagiannya adalah pada tahun pertama, anak sapi di berikan kepada peternak, anak ke dua pada tahun kedua diberi kepada pemilik modal dan begitu seterusnya. Menurut peternak yang menerapkan sistem ini, sebenarnya bentuk apapun dalam sistem teseng bagi peternak tidak masalah, dikarenakan peternak biasanya hanya menerima sapi yang diberikan oleh pemilik modal untuk dipelihara.

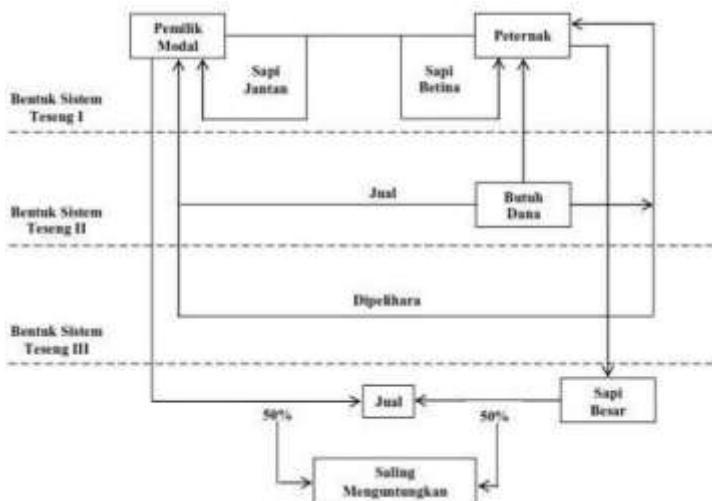
### Bentuk Sistem Teseng III

Bentuk sistem teseng ketiga ini merupakan pengembangan dari bentuk sistem teseng pertama dimana mekanisme dari pembagiannya sama dengan bentuk sistem teseng pertama, namun terdapat juga pola pembagian yang divariasikan. Pada bentuk sistem teseng ketiga ini sapi yang diberikan oleh pemilik modal adalah dua ekor sapi betina kepada peternak, ada dua bentuk pembagian pada bentuk sistem teseng ketiga ini, pertama ketika kedua induk sapi ini beranak maka di bagi rata, satu ekor ke pemilik dan satu ekor ke peternak, pada tahun ke dua dan tahun kelima pola pembagian tetap sama kedua anak dari kedua induk di bagi rata masing masing satu.

Teseng biasanya diterapkan pada peternakan dengan mekanisme bagi hasil antara peternak dengan pemilik modal akan tetapi pelaksanaan dan bentuk perjanjian cenderung variatif. Keberagaman pelaksanaan dan bentuk perjanjian (lisan-tertulis) tidak lepas dari adat istiadat yang berlaku disuatu daerah. Hasil usaha akan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara pemberi modal dan petani/peternak. Biasanya tidak ada ikatan/kontrak secara tertulis tentang kerjasama usaha tersebut. Kerjasama antara pemilik modal dan Pa'teseng hanya secara lisan dan didasarkan atas saling percaya dan biasanya adalah orang yang sudah dikenal baik oleh pemodal ataupun yang dikenalkan oleh kerabat pemodal. Sistem Tesang ini menunjukkan bahwa nilai *trust* (kepercayaan) dan norma-norma berperan sangat penting yang berlaku pada kedua belah pihak (Sirajuddin, dkk., 2014).

Prinsip budidaya peternakan adalah mencari manfaat atau profit dari kegiatan yang dilakukannya. Sapi Bali yang banyak dijadikan komoditi daging/sapi potong. Kinerja usaha ternak juga dipresentasikan melalui komponen pendapatan peternak dan kemampuan kecepatan mengadopsi pengetahuan (Guntoro dan Riyadi, 2012). Sistem bagi hasil gaduh dikerjakan mulai dari proses pra produksi, produksi hingga pemasaran yang saling membutuhkan dan menguntungkan antar pemilik modal dan peternak itu sendiri. Selain itu gaduh juga sering dilakukan pada masyarakat peternak baik sapi, kambing maupun kerbau dengan mekanisme bagi hasil antara peternak dan pemilik ternak (Sanjaya dan Sudarwati, 2015). Pola bagi hasil terhadap usaha sapi potong tampak beragam, nilai penghasilan peternak juga bervariasi namun bermanfaat dan tampaknya pola tersebut dapat diterima dengan baik oleh peternak yang bergabung dalam kelompok (Sumanto, 2013), termasuk juga dengan sistem bagi hasil pada penggemukan sapi Bali di Kabupaten Kupang (Jeremias, dkk., 2017).

Hasil penelitian yang dilakukan Ardiansyah (2013), mengemukakan bahwa terdapat kelemahan dalam pola sistem bagi hasil (teseng) yaitu tidak adanya kesepakatan tertulis dalam sistem bagi hasil (teseng), sehingga kedua belah pihak antara peternak dan pemilik ternak hanya mengedepankan konsep kepercayaan atau kekeluargaan. Dengan masih adanya kelemahan dalam pola sistem bagi hasil (teseng) dimana tidak adanya kesepakatan tertulis yang dilakukan. Dari ketiga bentuk sistem teseng tersebut dapat dibentuk model sistem teseng sapi potong yang diterapkan pemilik modal dan peternak di Kabupaten Bone seperti pada Gambar 1.



**Gambar 1. Model Bentuk Sistem Teseng Sapi Potong di Kabupaten Bone**

### Pengambilan Keputusan Peternak melakukan Sistem Teseng

Permintaan dari keluarga melakukan sistem teseng di Kabupaten Bone merupakan bentuk bantuan dari keluarga sebagai pemilik modal memberikan bantuan sapi potong untuk dipelihara hingga mendapatkan hasil dengan bertambahnya jumlah populasi sapi potong. Sistem teseng dilakukan atas dasar perjanjian dalam bentuk kepercayaan keluarga. Tuntutan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga merupakan salah faktor sehingga peternak melakukan sistem teseng.

Peternak berkeinginan memulai suatu usaha ternak sapi potong tapi tidak mempunyai cukup modal untuk membeli indukan sapi betina dan jantan sehingga mereka tertarik untuk melakukan sistem teseng, agar bisa mendapatkan bantuan indukan pejantan dan betina dari pemilik modal. Tambahan pendapatan yang diperoleh peternak dari hasil sistem teseng karena belum mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya dari pekerjaan pokoknya seperti petani tanaman pangan dan wiraswasta sehingga peternak tertarik melakukan sistem teseng usaha sapi potong sebagai usaha sambilan. Menurut Kusnadi (2008), yang menyatakan bakwa pada saat ini tingkat kepemilikan dalam usaha tani relatif kecil.

Pendapatan kotor petani masih belum cukup memenuhi kebutuhan hidup petani dan keluarganya. Sehingga usaha ternak merupakan sumber tambahan pendapatan yang penting untuk menopang kebutuhan keluarga tani khususnya di pedesaan. Peternak memiliki banyak waktu luang dan curahan tenaga kerja sehingga pengambil keputusan untuk melakukan sistem teseng. Sistem teseng berhubungan dengan tenaga kerja dan curahan waktu dalam memelihara ternak sapi potong. Keterlibatan tenaga kerja anggota keluarga berperan penting dalam berhasil tidaknya usaha ternak sapi potong yang dikelola oleh peternak.

Penerapan sistem teseng yang lebih mudah dipersepsikan dengan baik oleh peternak sehingga mau melakukannya dimana sistem teseng didasari atas kepercayaan saja selain itu yang memberikan bantuan adalah kerabat dan keluarga dari peternak. Sementara sistem serupa yang diterapkan oleh pemerintah melalui Program Pinjaman Modal Usaha (PMU) dan Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) melalui sistem bagi hasil sapi potong

dianggap peternak sulit dan rumit, karena banyaknya persyaratan administrasi, bukti kepemilikan lahan dan persyaratan perjanjian dianggap berisiko oleh peternak.



**Gambar 2. Kegiatan Penyuluhan**

Sistem teseng dapat meningkatkan status sosial peternak yang pada awalnya tidak memiliki ternak, namun dengan melakukan sistem teseng bisa memiliki ternak yang dapat meningkatkan harga diri serta status sosial peternak dimasyarakat. Setiap masyarakat memiliki ukuran tertentu untuk menghargai suatu hal yang ada dalam masyarakat tersebut. Jika masyarakat lebih menghargai kekayaan material dibandingkan yang lainnya, masyarakat yang memiliki kekayaan yang banyak akan memperoleh posisi pada tingkat tertinggi, sedangkan masyarakat yang tidak memiliki kekayaan banyak akan selalu berada pada posisi tingkatan rendah. Status sosial dalam masyarakat merupakan pencerminan, hal ini juga dikuatkan dengan kondisi lingkungan yang secara alamiah dan turun temurun menjadikan perbedaan kasta yang dilihat dari sisi finansial dan kepemilikan lahan atau jenis usaha yang dijalankan

### **Penerapan Pengelolaan Usaha Sapi Potong Melalui Sistem Teseng**

Perjanjian kerjasama merupakan suatu tindakan yang saling mengikatkan diri dengan satu orang atau lebih pada suatu perjanjian yang mana akan menghasilkan kewajiban untuk bertindak, dalam hal ini melakukan kegiatan peternakan sapi potong dengan sistem bagi hasil. Kerjasama yang terbentuk dari perjanjian sistem bagi hasil ternak sapi potong menunjukkan hasil yang dominan diantara pilihan pertanyaan yang diutarakan dalam penelitian dan jawaban yang diperoleh dari peternak. Hasil yang ditemukan dalam pengabdian ini adalah aspek perjanjian kerjasama antara pemilik modal dengan peternak, antara lain; ketentuan perjanjian kerjasama dilakukan dengan perjanjian kerjasama yang hanya berlaku antara pemilik modal dengan satu orang peternak, kemudian bentuk perjanjian kerjasama dilakukan antara pemilik modal dengan peternak hanya secara lisan, sedangkan aspek pelaksanaan perjanjian kerjasama dilaksanakan langsung antara pemilik modal dengan peternak. Hal ini menjelaskan bahwa sistem teseng dilakukan jelas dan terang antara pemilik modal dan peternak, tanpa dicampuri oleh pihak lain, agar tercipta kepercayaan antar kedua belah pihak.

Perjanjian kerjasama harus dilaksanakan dengan itikad baik yang telah dimulai sejak para pihak akan memasuki perjanjian tersebut dengan demikian maka pembuatan

perjanjian harus dilandasi atas kemitraan. Usaha peternakan sapi potong memiliki berbagai macam bentuk modal yang diberikan, sebagai bentuk kerjasama dalam perjanjian bagi hasil. Bentuk modal yang diberikan pemilik modal kepada peternak dalam bentuk ternak sapi potong. Sedangkan pengetahuan peternak terhadap modal yang akan diberikan pemilik modal sudah tahu dari saat akan melaksanakan kerjasama.

Pemberian modal berupa sapi potong hidup sebagai upaya pemilik modal dalam memudahkan pihak peternak untuk langsung menjalankan perannya beternak sapi potong, tanpa pemberian dana tunai maupun benda berharga yang dapat diuangkan. Dikarenakan modal sebagai salah satu faktor yang utama dari sistem perjanjian bagi hasil agar memudahkan dalam pelaksanaan sistem teseng. Berdasarkan konsep bagi hasil antara pemilik modal dengan peternak memiliki 2 (dua) bentuk kerjasama yaitu konsep bagi hasil keuntungan hasil penjualan ternak sapi potong, dan yang paling mendominasi adalah konsep bagi hasil ternak sapi potongnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan pembagian hasil usaha sapi potong setelah ternak sapi baik sapi masih berusia sapih maupun telah dewasa. Metode pemeliharaan ternak sapi potong pada sistem teseng yang diterapkan antara pemilik modal dengan peternak, memiliki bentuk pemeliharaan ternak sapi potong dipelihara sendiri oleh peternak yang melakukan sistem teseng, sementara cara pemeliharaan ternak sapi potong memiliki 3 kategori pemeliharaan yaitu digembalakan di padang rumput, lalu pemeliharaan dikandangkan dan diberi pakan, dan yang paling banyak pemeliharaan dengan kombinasi antara digembalakan dan dikandangkan.

Pemeliharaan ternak sapi potong dipelihara sendiri oleh peternak yang melakukan sistem teseng, agar pemeliharaan ternak sapi potong menjadi tanggung jawab penuh peternak. Sedangkan pemeliharaan ternak yang cenderung masih tradisional yaitu dengan mengembalakan ternak pada pagi hari, dan memasukkan ternak kedalam kandang ada sore hari. Kelebihan dari pola pemeliharaan intensif antara lain lebih mudah dalam pengontrolan, manajemen pengumpulan feses, manajemen reproduksi, serta pengumpulan pelepas dan daun sawit, sedangkan kelemahannya adalah sapi tidak diarahkan untuk memakan gulma yang terdapat disekitar lahan perkebunan kelapa sawit, serta peternak harus menyediakan waktu untuk mengarit rumput (Setiawan, et al., 2019).



**Gambar 3. FGD Manajemen Usaha Peternakan**

Waktu pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh pemilik modal dan peternak memiliki jangka waktu yang dibatasi dijalankan peternak, namun tidak ada yang melaksanakan kerjasama jangka waktu yang tidak dibatasi, hal ini disebabkan karena pemilik modal dan peternak masing-masing bekerjasama dalam jangka waktu tertentu, jika ada kecocokan diantara kedua belah pihak maka kerjasama akan diperpanjang, begitupula sebaliknya jika terjadi ketidakcocokan maka kerjasama akan dihentikan agar mengurangi kerugian yang akan terjadi. Risiko kerugian yang datang harus di antisipasi secara tepat karena akan berpotensi melemahkan motivasi petani untuk mengembangkan usaha tani atau bahkan dapat mengancam ketahanan pangan nasional (Vandawati, dkk. 2019).

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil pelaksanaan pengabdian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Bentuk sistem teseng sapi potong di Kabupaten Bone terbagi menjadi tiga bentuk yang pelaksanaan berjalan dengan baik, karena dengan pelaksanaan sistem teseng sapi potong ini sangat membantu dan memberikan keuntungan kepada peternak. Dari ketiga bentuk sistem teseng sapi potong di Kabupaten Bone pada umumnya peternak menginginkan pelaksanaan sistem teseng dengan bentuk pertama karena pemilik modal menganggap lebih cepat dalam proses pengembangbiakan, selain itu bagi peternak sendiri menganggap bentuk sistem teseng pertama dapat memberikan keuntungan lebih banyak bagi peternak karena anak pertama ditahun pertama akan menjadi milik peternak sesuai dengan sistem bagi hasilnya. Akan tetapi peternak beranggapan bahwa sebenarnya bentuk sistem teseng yang bagaimanapun dalam bentuk sistem teseng bagi peternak tidak masalah dikarenakan inti dari sistem teseng lebih kepada saling membantu antara pemilik modal dan peternak atas dasar kepercayaan.

Pengambilan keputusan peternak melakukan sistem teseng yang terdiri dari (1) adanya permintaan dari keluarga; (2) tuntutan ekonomi keluarga; (3) modal usaha yang terbatas; (4) tambahan pendapatan; (5) adanya waktu luang; (6) penerapan sistem teseng lebih mudah; dan (7) meningkatkan status sosial berada pada kategori baik. Penerapan pengelolaan usaha sapi potong melalui sistem teseng berdasarkan perjanjian kerjasama, modal, konsep bagi hasil, cara pemeliharaan sapi potong, dan waktu kerjasama sudah dilakukan dengan baik antara pemilik modal dengan peternak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ardiansyah, A. (2013). Sistem bagi hasil (teseng) usaha sapi potong di Desa Batu Lappa Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone [Skripsi]. Universitas Hasanuddin.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone. (2018). Kabupaten Bone dalam angka 2018.
- Departemen Pertanian. (2012). Populasi dan produksi peternakan di Indonesia. <http://www.pertanian.go.id>
- Guntoro, B., & Riyadi, R. (2012). Motivation and performance of beef cattle smallholder farmers in Central Java Indonesia. Research Journal of Animal Science, 6(4-6), 85-89.
- Jeremias, J.A., et al. (2017). Tingkat pendapatan peternak pada penggemukan sapi Bali dengan sistem bagi hasil di Kabupaten Kupang. Jurnal Partner, 1, 43-50.
- Kusnadi. (2008). Research methods for business (2nd ed.). Wiley.
- Rianto, E., & Purbowati, E. (2009). Panduan lengkap sapi potong. Penebar Swadaya.

- Rohani, S.T., et al. (2018). Kemampuan kewirausahaan peternak dengan sistem teseng di Bone. Prosiding Seminar Nasional PERSEPSI III, Manado.
- Sanjaya, S., & Sudarwati, L. (2015). Modal sosial sistem bagi hasil dalam beternak sapi pada masyarakat Desa Purwosari. *Perspektif Sosiologi*, 3(1), 18-31.
- Setiawan, B.D., et al. (2019). Evaluasi sistem manajemen usaha pembibitan sapi Bali terintegrasi dengan perkebunan kelapa sawit. *Jurnal Ilmiah Peternakan Terpadu*, 7(3), 276-286.
- Sirajuddin, S.N. (2013). Peran Teseng dalam peningkatan populasi sapi potong di Kabupaten Bone. Universitas Hasanuddin.
- Sirajuddin, S.N., et al. (2014). Penerapan sistem bagi hasil tradisional (Tesang) pada usaha sapi potong di Kabupaten Barru. *Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin*.
- Sumanto. (2013). Pemberdayaan peternak sapi potong melalui kemitraan bagi hasil di Kalimantan. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner, 250-258.
- Vandawati, Z., et al. (2019). Perjanjian asuransi pertanian pada program ketahanan pangan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 592-612.
- Zainabriani, S.N., et al. (2015). Identifikasi faktor peternak dan pemilik modal melakukan sistem bagi hasil teseng sapi potong di Desa Batu Pute. Skripsi, Universitas Hasanuddin.